

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP URGENSI PENCEMARAN SAMPAH DI DAERAH PESISIR TANJUNGPINANG

Donna Tiurlan Manurung *¹
Rossindy Heryanti Situmenang ²

^{1,2} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

*e-mail: donnamanurung191@gmail.com

Abstrak

Pencemaran sampah di daerah pesisir Tanjung Pinang merupakan permasalahan yang perlu ditangani secara serius. Hal ini disebabkan oleh perilaku kebiasaan masyarakat yang membuang limbah rumah tangga langsung ke laut. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Tanjung Pinang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bertanggung jawab untuk menjaga kawasan pesisir agar tetap bersih dari pencemaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan DLH dalam mengatasi agensi pencemaran sampah di daerah pesisir Tanjung Pinang dengan studi kasus Tanjung Unggat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan DLH dalam mengatasi agensi pencemaran sampah di daerah pesisir Tanjung Pinang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar; Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai, Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan DLH, perlu dilakukan upaya-upaya, antara lain: Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar, Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai, Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Kata Kunci: Efektivitas kebijakan, pencemaran sampah, daerah pesisir, Tanjung Pinang, Tanjung Unggat

Abstract

Garbage pollution in the coastal area of Tanjung Pinang is a problem that needs to be addressed seriously. This is caused by the habitual behavior of people who throw household waste directly into the sea. Based on Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning Waste Management in Tanjung Pinang City, the Environmental Service (DLH) is responsible for keeping coastal areas clean from pollution. This research aims to determine the effectiveness of DLH policies in dealing with waste pollution agencies in the Tanjung coastal area Pinang with a case study of Tanjung Unggat. This research uses empirical research methods with a qualitative approach. Data was obtained through interviews and observations. The results of the research show that the effectiveness of DLH policies in dealing with waste pollution agencies in the Tanjung Pinang coastal area is still low. This is caused by several factors, including lack of socialization and education to the public about the importance of proper waste management; Lack of adequate waste management facilities and infrastructure, Lack of supervision and law enforcement against people who throw rubbish carelessly. To increase the effectiveness of DLH policies, efforts need to be made, including: Increasing socialization and education to the public about the importance of correct waste management, Providing adequate waste management facilities and infrastructure, increasing supervision and law enforcement against people who throw rubbish carelessly.

Keywords: Policy effectiveness, waste pollution, coastal areas, Tanjung Pinang, Tanjung Unggat

PENDAHULUAN

Di Indonesia sampah menjadi salah satu permasalahan krusial. Hal tersebut tentunya membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat. Sampah yang terdiri dari sampah organik dan non organik dapat mencemari lingkungan, seperti menimbulkan bau tidak sedap, mengurangi estetika suatu tempat, merusak unsur tanah, mencemari perairan dan lain sebagainya. Akan tetapi kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih sangat minim,

yang menyebabkan masih banyak daerah di Indonesia tidak luput dari tumpukan sampah. Banyak ditemukan di beberapa titik seperti lahan kosong di tengah perkotaan menjadi tumpukan sampah yang kemudian menjadi gunung sampah, di sudut sudut pemukiman juga masih banyak tumpukan sampah, bahkan di perairan seperti sungai, danau, dan tepi laut juga masih menjadi sasaran tumpukan sampah. Hal tersebut lah yang menjadi permasalahan di beberapa daerah pesisir Tanjungpinang, membutuhkan perhatian dari masyarakat dan pemerintah karena jika permasalahan tersebut tidak ditangani dikhawatirkan tumpukan sampah akan semakin parah seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Di daerah Tanjungpinang sampah merupakan salah satu hal yang harus diselesaikan, karena terdapat di beberapa titik penumpukan sampah yang sangat mengganggu. Sampah dapat menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, menyebabkan bau tidak sedap/bau busuk, dan menyebabkan terganggunya estetika suatu daerah. Di beberapa daerah pesisir yang ada di Kota Tanjungpinang membutuhkan perhatian dari Masyarakat dan pemerintah. Hal tersebut disebabkan banyaknya sampah di daerah pesisir. Selain mengurangi estetika tempat tersebut, sampah juga dapat menyebabkan biota laut mengalami hambatan dalam pertumbuhannya. Jika biota laut terganggu dikhawatirkan terjadi kepunahan yang mengancam mata pencaharian nelayan.

Kondisi tersebut mengharuskan masyarakat dan pemerintah turun tangan menyelesaikan masalah ini. Setiap harinya sampah di daerah pesisir tidak berkurang, terutama di daerah tepi laut, pelantar 1 dan pelantar 2. Sampah tersebut berasal dari kegiatan usaha, dan sampah rumah tangga. Kesadaran masyarakat yang sangat rendah menjadi penyebab utamanya. Beberapa pengunjung di daerah tepi laut sering sekali meninggalkan sampah di daerah sekitar pesisir. Kondisi pasang surut air laut juga membuat permasalahan sampah ini semakin sulit diatasi. Bahkan para petugas kebersihan dari dinas lingkungan hidup kewalahan mengatasi masalah tersebut karena kesulitan akses. Penelitian tentang dampak sampah laut bagi ekosistem di perairan Indonesia sangat penting sebagai bahan untuk membuat kebijakan dan aturan perusahaan, stakeholder, dan pemerintah akan urgensi untuk membebaskan laut dari sampah plastik dan turunannya.

Efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi urgensi pencemaran sampah di wilayah pesisir kota sangat penting karena pencemaran sampah dapat memiliki dampak serius pada lingkungan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

1. Tingginya Volume Sampah: Pesisir kota sering kali memiliki tingkat produksi sampah yang tinggi karena populasi yang padat dan aktivitas industri. Hal ini membuat pengelolaan sampah menjadi tantangan besar.
2. Dampak Lingkungan: Pencemaran sampah di wilayah pesisir dapat merusak ekosistem laut, mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan, dan merusak keindahan pantai. Hal ini mempengaruhi keanekaragaman hayati dan kualitas air.
3. Ancaman Kesehatan Masyarakat: Sampah yang menumpuk di pantai dapat menjadi sarang penyakit dan menjadi tempat berkembang biak bagi vektor penyakit. Ini dapat mengancam kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
4. Dukungan Sumber Daya: Efektivitas kebijakan tergantung pada dukungan sumber daya yang tersedia, termasuk anggaran, personel, dan infrastruktur untuk pengelolaan sampah.
5. Kesadaran Masyarakat: Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan partisipasi aktif dalam program pengurangan sampah juga memengaruhi efektivitas kebijakan.

Untuk menanggulangi sampah pesisir, pemerintah dan masyarakat dapat melakukan langkah-langkah berikut:

Pemerintah:

- a. Mengimplementasikan kebijakan yang ketat terkait pengelolaan sampah pesisir, termasuk larangan pembuangan sampah ke laut.
- b. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait sampah pesisir.

- c. Mengembangkan infrastruktur untuk pengumpulan, pengolahan, dan daur ulang sampah di wilayah pesisir.
- d. Memberikan insentif kepada industri dan masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong produk ramah lingkungan.
- e. Mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif sampah pesisir dan pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan.

Masyarakat:

- a. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan beralih ke produk yang lebih ramah lingkungan.
- b. Partisipasi aktif dalam program pembersihan pantai dan daerah pesisir.
- c. Mendukung usaha-usaha lokal dalam pengelolaan sampah, seperti bank sampah atau pengolahan sampah organik.
- d. Edukasi diri dan orang lain tentang dampak sampah pesisir dan bagaimana cara mengurangnya.
- e. Melaporkan pelanggaran terkait pembuangan sampah ilegal ke pemerintah setempat.

Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi masalah sampah pesisir dan menjaga keberlanjutannya. Permasalahan sampah di Tanjungpinang, seperti di banyak kota lainnya, dapat melibatkan berbagai isu. Pengelolaan Sampah yang Tidak Efektif: Salah satu masalah utama adalah kurangnya sistem pengelolaan sampah yang efektif. Ini dapat menyebabkan penumpukan sampah di jalanan, di sungai, atau di lahan terbuka. Keterbatasan Infrastruktur: Infrastruktur pengelolaan sampah yang kurang memadai seperti tempat pembuangan akhir (TPA) yang sesuai dan fasilitas daur ulang dapat menjadi masalah serius. Kesadaran Masyarakat: Kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuang sampah dengan benar dan memilah sampah juga dapat menjadi permasalahan. Pendidikan dan kampanye sosial mungkin diperlukan untuk meningkatkan kesadaran ini. Sampah Plastik: Seperti di banyak tempat lain, penggunaan plastik sekali pakai dan masalah sampah plastik juga menjadi isu yang harus diatasi di Tanjungpinang. Kerjasama Antar Pihak: Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan sampah ini. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi lingkungan, dan masyarakat. Program pengelolaan sampah yang lebih baik, pendidikan lingkungan, serta promosi daur ulang dan pengurangan plastik sekali pakai dapat membantu mengurangi dampak permasalahan sampah di Tanjungpinang.

METODE

Penyusunan artikel ilmiah ini dilaksanakan Bulan November-Desember 2023 di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada telaahan studi pustaka dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi, data observasi lapangan, dan dokumentasi. Pada penelitian ini untuk mendapatkan data, penulis melakukan dokumentasi, observasi lapangan, dan melakukan kajian literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang dalam mengelola sampah di daerah pesisir, terutama di Kelurahan Tanjung Unggat, masih belum optimal. Beberapa kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti kurangnya tempat pembuangan sementara (TPS), kendaraan pengangkut, dan fasilitas daur ulang. Hal ini menyebabkan tumpukan sampah menjadi pemandangan umum di area pemukiman dan pesisir.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang benar masih sangat rendah. Edukasi yang diberikan DLH belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku masyarakat, yang sebagian besar masih membuang sampah sembarangan, terutama di wilayah pesisir. Rendahnya kesadaran ini diperburuk dengan lemahnya pengawasan dan

penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah ilegal. Banyak pelanggar yang tidak mendapat sanksi tegas, sehingga perilaku ini terus berulang.

Dampak dari pengelolaan sampah yang kurang efektif ini terlihat pada kondisi lingkungan yang semakin tercemar. Sampah yang menumpuk di pesisir tidak hanya merusak estetika wilayah, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut. Biota laut yang terganggu akibat pencemaran sampah dapat berdampak pada mata pencaharian masyarakat, khususnya nelayan. Selain itu, sampah yang tidak terkelola dengan baik meningkatkan risiko penyebaran penyakit bagi masyarakat sekitar.

Upaya yang telah dilakukan DLH, seperti sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam program kebersihan, masih belum memberikan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta. Pendekatan ini harus mencakup penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, edukasi berkelanjutan, dan pengawasan yang lebih ketat.

Pengelolaan limbah merupakan isu kompleks yang seharusnya menjadi fokus utama di suatu wilayah. Strategi pengelolaan limbah perlu dirancang secara menyeluruh dari sumber ke tujuan, bertujuan untuk memberikan dampak positif secara ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan melindungi lingkungan. Diperlukan keterlibatan aktif dari masyarakat dan dukungan penuh dari lembaga pemerintahan agar pengelolaan limbah di suatu daerah dapat berhasil. Fenomena penanganan limbah di daerah pesisir menjadi perhatian khusus, mengingat dampak negatifnya terhadap kualitas dan jumlah permukiman di wilayah tersebut. Pencemaran lingkungan adalah perubahan unsur abiotik yang disebabkan oleh aktivitas yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Penggunaan kendaraan bermotor atau alat pengolah bahan baku, misalnya, tidak selalu mematuhi peraturan lingkungan hidup. Polusi memiliki dua kategori bahan:

1. Polutan yang dapat terdegradasi adalah polutan yang dapat terurai atau kualitas bahayanya diturunkan ke tingkat yang dapat ditoleransi melalui proses alami. Kotoran manusia atau hewan dan limbah tumbuhan adalah dua contohnya.

2. Polutan yang tidak dapat terurai secara hayati adalah polutan yang tidak dapat diuraikan oleh proses alami. Merkuri, timbal, arsenik, dan logam berat lainnya adalah contohnya.

Terdapat berbagai factor yang dapat mencemari lingkungan. Namun manusia adalah faktor yang paling penting. Kita semua berkontribusi terhadap proses pencemaran lingkungan, Aktivitas dan perbuatan kita sehari-hari tanpa disadari turut berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, seperti:

1. Meluasnya penggunaan kantong plastik,
2. Pembuangan sampah dan limbah deterjen ke wilayah perairan
3. Penggunaan AC yang berlebihan, pembuangan limbah elektronik yang tidak sesuai, kebakaran hutan
4. Penggunaan kendaraan pribadi berkontribusi terhadap peningkatan polusi.
5. Limbah pabrik atau pembuangan limbah ke daerah perairan
6. Deforestasi yang menyebabkan hutan tidak mampu menyerap CO₂ lebih banyak, dan sebagainya.

Sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kepri, Tanjungpinang memiliki sejumlah kawasan permukiman di wilayah pesisir yang menghadapi tantangan serius. Beberapa daerah, termasuk Kelurahan Tanjung Unggat, menunjukkan kondisi kumuh yang belum mendapat perhatian optimal dari Pemerintah Daerah. Di sana, mayoritas rumah masih terbuat dari kayu, dengan akses jalan berupa pelantar beton melintasi lorong-lorong padat permukiman. Dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang, penyelesaian berbagai permasalahan pembangunan, terutama penataan kawasan kumuh di wilayah pesisir, menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama kebijakan anggaran antara Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Provinsi Kepri, dan Pemerintah Pusat. Pencemaran sampah yang terjadi di daerah pesisir bukan permasalahan yang baru lagi bagi masyarakat Tanjungpinang. Dinas Lingkungan Hidup sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga cukup sering menangani permasalahan sampah di daerah pesisir. Berbagai upaya tentu saja

sudah dilakukan dalam memecahkan solusi atas permasalahan ini dengan menerapkan kebijakan-kebijakan. Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi permasalahan pencemaran sampah di Tanjung Unggat adalah dengan menghimbau masyarakat agar dapat membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya atau di tong sampah. Hal tersebut perlu digiatkan karena sampah yang ada di pesisir Tanjung Unggat didominasi oleh sampah rumah tangga.

Kelurahan Tanjung, Unggat merupakan salah satu kelurahan yang mempunyai posisi yang strategis, karena letaknya yang berdekatan dengan pusat Kota Tanjungpinang dan di sisi jalan protokol, yang merupakan jalan utama yang melewati pusat kota. Kelurahan Tanjung Unggat mempunyai suhu rata-rata 21°C, kelembaban udara rata-rata 61-91 % dan tekanan udara minimum 1.005 MBS dan maksimum 1.013,7 MBS dengan curah hujan rata-rata sebesar 630 sampai dengan 3,050 mm/tahun. Wilayah Kelurahan Tanjung Unggat dibatasi oleh:

- Sebelah Utara
Berbatas dengan Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota
- Sebelah Barat
Berbatas dengan Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat
- Sebelah Selatan
Berbatas dengan Kelurahan Tg Pinang Timur Kecamatan Bukit Bestari
- Sebelah Timur
Berbatas dengan Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur

Berdasarkan data yang kami dapatkan kondisi daerah Tanjung Unggat sudah sejak lama mengalami kondisi lingkungan yang buruk, dimana lingkungan masyarakat yang kumuh, dan padat. Sebagai sebuah kelurahan yang memiliki wilayah permukiman kumuh terluas di Kota Tanjungpinang, Pemerintah setempat telah mengutamakan penataan lingkungan, khususnya di Kelurahan Tanjung Unggat. Meskipun program penataan tersebut telah dimulai sejak tahun 1989, Kelurahan Tanjung Unggat tidak terakomodasi karena wilayahnya tidak dianggap membutuhkan perhatian pada saat itu. Pada awalnya, paradigma pembangunan menggunakan pendekatan top down, di mana pemerintah melaksanakan proyek tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, karena kurangnya keterlibatan masyarakat dan tumpang tindih proyek, pendekatan ini terbukti tidak efektif. Baru setelah tahun 1998, dengan perubahan paradigma menjadi bottom up, program penataan lingkungan kumuh melibatkan aktif partisipasi masyarakat di Kelurahan Tanjung Unggat.

Program tersebut dimulai dengan pemecahan Kelurahan Tanjungpinang Timur menjadi dua, yaitu Kelurahan Tanjungpinang Timur dan Kelurahan Tanjung Unggat. Harapannya, dengan wilayah yang lebih kecil, partisipasi masyarakat dapat terlibat lebih aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan penataan lingkungan. Inisiatif ini menjadi program kerja utama Pemerintah Kelurahan Tanjung Unggat, di mana proposal penataan lingkungan kumuh disusun bersama masyarakat dan disetujui sebelum diajukan kepada Walikota. Dengan fokus pada partisipasi masyarakat, program penataan lingkungan kumuh di Kelurahan Tanjung Unggat melibatkan identifikasi masalah bersama, penyusunan proposal, dan pelaksanaan berdasarkan kesepakatan. Perbaikan prasarana, seperti aksesibilitas dan saluran drainase, menjadi tahap pertama yang berhasil dilaksanakan dengan bantuan dana swadaya masyarakat, didukung oleh pemerintah. Usaha ini bukan hanya untuk memperbaiki lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat. Diharapkan, dengan lingkungan yang lebih baik, aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih lancar dan kota terlihat lebih teratur. Rencana perbaikan lingkungan di Tanjung Unggat terdiri dari dua tahap, di mana tahap pertama telah sukses dilaksanakan dengan perbaikan jalan dan drainase menggunakan dana swadaya masyarakat.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang dalam mengelola pencemaran sampah di daerah pesisir, terutama di Kelurahan Tanjung Unggat, masih belum efektif. Beberapa kendala utama meliputi keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Keterbatasan fasilitas mencakup minimnya tempat pembuangan sementara (TPS) di lokasi strategis, kurangnya armada pengangkut sampah, serta absennya fasilitas daur ulang yang memadai. Hal ini menyebabkan akumulasi sampah di pesisir menjadi pemandangan yang umum dan berdampak langsung pada estetika lingkungan serta kualitas hidup masyarakat setempat.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang benar juga menjadi hambatan besar. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih membuang sampah secara sembarangan ke laut, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan dampaknya terhadap ekosistem laut dan kehidupan mereka sendiri. Edukasi yang diberikan oleh DLH sejauh ini belum efektif dalam mengubah perilaku tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh DLH terhadap pelanggaran aturan pengelolaan sampah juga masih lemah. Kurangnya penegakan hukum membuat pelanggaran seperti pembuangan sampah ilegal terus terjadi tanpa konsekuensi yang signifikan. Akibatnya, kebiasaan ini terus berlanjut dan menciptakan efek domino terhadap kondisi lingkungan di pesisir.

Dampak dari kebijakan yang tidak efektif ini terlihat jelas pada kondisi lingkungan pesisir Tanjung Unggat. Sampah yang menumpuk tidak hanya mengurangi estetika wilayah, tetapi juga mengganggu ekosistem laut. Biota laut seperti ikan dan terumbu karang mengalami tekanan akibat pencemaran, yang pada akhirnya mengancam mata pencaharian nelayan setempat. Selain itu, sampah yang tidak terkelola juga meningkatkan risiko penyebaran penyakit bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir. Dalam konteks analisis kebijakan, efektivitas kebijakan ini tergolong rendah karena tahap implementasi dan evaluasi kebijakan tidak berjalan optimal. Upaya yang dilakukan, seperti sosialisasi dan pelibatan masyarakat, belum menghasilkan perubahan yang signifikan. Program-program yang ada saat ini cenderung kurang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat dan minim pengawasan langsung di lapangan.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Pendekatan ini dapat mencakup peningkatan fasilitas pengelolaan sampah, penyediaan TPS di lokasi strategis, dan pengembangan program edukasi berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pembuangan sampah ilegal juga sangat diperlukan. Pemerintah dapat belajar dari praktik terbaik daerah lain yang telah berhasil menangani permasalahan serupa, seperti penerapan sistem insentif bagi masyarakat yang mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta, kebijakan pengelolaan sampah di Tanjungpinang diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan, baik untuk lingkungan maupun kehidupan masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam mengatasi pencemaran sampah di daerah pesisir, khususnya di Kelurahan Tanjung Unggat, masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup peningkatan fasilitas dan infrastruktur, edukasi masyarakat yang berkelanjutan, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta sangat penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di daerah pesisir. Prospek pengembangan penelitian ini dapat diarahkan pada perumusan kebijakan berbasis partisipasi masyarakat yang adaptif, sehingga mampu menghasilkan perubahan yang signifikan dalam pengelolaan sampah, baik di tingkat lokal maupun regional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Edisi Kedua). Bumi Aksara. Jakarta.
- Achmadi, U. F. (2008). *Peranan Air Dalam Peningkatan Kesehatan Masyarakat*.

- Dwijowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- GESAMP. (2015). *Sources, fate and effects of microplastics in the marine environment: A global assessment*. IMO/FAO/UNESCO-IOC/UNIDO/WMO/IAEA/UN/UNEP/UNDP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection. London: GESAMP.
- Hardesty, B. D., & Wilcox, C. (2017). A risk framework for tackling marine debris. *Royal Society Open Science*, 4(5), 171-182.
- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768-771.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2018). *Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Laut*. Jakarta: KLHK.
- Law, K. L., & Thompson, R. C. (2014). Microplastics in the seas. *Science*, 345(6193), 144-145.
- Lestari, P., & Trihadiningrum, Y. (2019). The impact of improper solid waste management to plastic pollution in Indonesian coast and marine environment. *Marine Pollution Bulletin*, 149, 110505.
- Marshall, A. D., & Johnstone, R. W. (2017). Impacts of marine debris on biodiversity: Current status and potential solutions. *Marine Pollution Bulletin*, 80(1), 12-23.
- Parsons, W. (2006). *Public Policy: An Introduction to The Theory and Practices of Policy Analysis* (Tri Wibowo, Trans.). Jakarta: Kencana.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- Suri, P. I. (2019). *Evaluasi Pengelolaan Sampah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat* (Tesis). Program Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru.
- Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Malang: Bayumedia Publishing.